

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli(tertua). terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah 937,47 Km. Adapun batas batas Kecamatan Mandau adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan.

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau terbentang antara 0056'12"LU- 1028'17"LU dan 100056'10" BT - 101043'26" BT, dengan ibukotanya di Air Jamban dan kecamatan ketiga terluas wilayahnya setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu yang mencapai 937,47 Bumbung yang mencapai luas 104 km² atau sebesar 11,09 persen dari luas total Kecamatan Mandau.²⁷

Secara topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota

²⁷ Badan Pusat Statisti Kab. Bengkalis *Kecamatan Mandau Dalam angka* 2018 h.1.

kecamatan, maka Desa Bathin Betuah adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 35 km.²⁸

B. Pemerintahan Kecamatan Mandau

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain : Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru. Kemudian Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain : Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbang, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang Dui.²⁹

Kecamatan Mandau Ibukota Duri secara administrasi Kecamatan Mandau dikepalai Oleh seorang Camat dan seorang Sekcam (sekretaris Camat). Didalam melaksanakan tugasnya ada 2 kepala sub bagian perangkat kecamatan, yaitu kepala sub bagian penyusunan program, umum dan kepegawaiian dan kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan. Dan juga membawahi 5 kasi (kepala seksi), yaitu Kasi Tata Pemerintahan, Kasi

²⁸ *Ibid*

²⁹ <http://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/statis/letak-geografis/1>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan asyarakat Desa, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, Kasi Ketentraman Ketertiban dan Kasi Pelayanan Umum.³⁰

C. Penduduk Kecamatan Mandau

Jumlah Penduduk Kecamatan Mandau pada tahun 2016 adalah 275.772 jiwa, yang terdiri dari 143.512 jiwa laki-laki dan 132.260 jiwa perempuan. Dari komposisi jumlah laki-laki dan perempuan tersebut, Kecamatan Mandau memiliki nilai sex rasio sebesar 108, hal ini menunjukkan bahwa dalam 100 jiwa perempuan terdapat 108 jiwa laki-laki. Dengan luas wilayah 912.47 km² dan jumlah penduduk 275.772 jiwa, ternyata menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 263, yang artinya dalam setiap 1 km² dihuni oleh sekitar 263 orang. Kecamatan Mandau mempunyai 71.835 jumlah keluarga dengan rata-rata jumlah warga dalam keluarga adalah empat orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/kelurahan.

D. Visi dan Misi Kecamatan Mandau

Tujuan utama Kecamatan Mandau yaitu “MEWUJUDKAN KANTOR CAMAT MANDAU SEBAGAI PEMERINTAHAN YANG BERWIBAWA, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB”

Visi Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis mengandung makna sebagai berikut :

³⁰ <http://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/statis/letak-geografis/1>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintahan Yang Berwibawa

Kantor Camat Mandau dengan dukungan segenap staf, karyawan dan karyawan berupaya sedaya upaya akan mewujudkan pemerintahan yang beribawa dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat bagi segenap masyarakat pengguna jasa pelayanan pemerintahan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemerintahan Yang Transparan

Transparan berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses secara langsung dan mudah dipahami.

3. Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab

Berarti segala keputusan dan pelaksanaan yang diambil dalam melaksanakan pemerintahan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi.³¹

Misi Kecamatan Mandau yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin, berdedikasi, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke depan.

³¹ *Ibid.*

2. Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan berwibawa (Good Government).
3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif,akuntabel dan transparan.

E. Ekonomi Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau berdasarkan data dari UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebanyak 2 perusahaan besar yang terletak di desa Bumbang dan Kesumbo Ampai. Sementara industri Sedang ada 4 unit, industri kecil 92 unit,dan industri mikro tercatat sebanyak 212 unit.

Dibidang perdagangan tercatat 15 buah swalayan/ supermarket/ toserba/ mini market, 2359 buah toko/ warung kelenteng. Bangunan pasar permanen/ semi permanen ada 7 buah dan pasar tanpa bangunan permanen sebanyak 6 buah. Sedangkan jumlah restoran/ rumah makan tercatat sebanyak 202, warung / kedai makan minum sebanyak 1769 buah, 5 buah penginapan (losmen/ wisma/ motel) dan 7 hotel melati/ berbintang.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Kecamatan Mandau tercatat sebanyak 61 Koperasi Unit Desa dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang, 60 yang terdiri dari 8 KUD dan 53 koperasi non KUD di Kecamatan Mandau. Jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 229 anggota KUD dan 1731 anggota koperasi non KUD.dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang.

F. Gambaran Umum Tentang Ruang Lingkup UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

UPT Pendapatan Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 17 ayat 2 UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Operasional Dinas Pendapatan Daerah Dilapangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 37 ayat 3 UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.³²

Dengan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1. Unsur pimpinan adalah kepala daerah
2. Unsur pembantu pimpinan adalah sekretariat
3. Unsur pelaksana adalah bidang.

Susunan organisasi dinas pendapatan daerah, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian perencanaan dan
 2. programSub bagian keuangan
 3. Sub bagian administrasiumum
- c. Bidang pendataan dan penetapan, terdiri dari:

³² Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2008 Tentang organisasi Dan Tata Kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi pendaftaran dan pendataan
 2. Seksi data dan informasi
 3. Seksi penetapan
- d. Bidang penegihan, terdiri dari:
 1. Seksi retribusi
 2. Seksi pembukuan dan verifikasi
 3. Seksi penagihan dan penghitungan
- e. Bidang retribusi dan pendataan lain-lain, terdiri dari:
 1. Seksi penerimaan retribusi
 2. Seksi penerimaan pendapatan lain-lain
 3. Seksi inventarisasi dan pembukuan.
- f. Bidang pendapatan pajak dan non pajak, terdiri dari:
 1. Seksi pendapatan pajak
 2. Seksi pendapatan non pajak
 3. Seksi pengkajian pendapatan
- g. UPT
- h. Kelompok jabatan fungsional.³³

Berdasarkan perda diatas, UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan unit pelaksana dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis juga memiliki visi, misi, kedudukan, tugas, dan fungsi yang sama dengan Dinas Pendaptan Daerah Kabupaten Bengkalis.

³³ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.go.id

Adapun visi dan misi, tugas, dan fungsi dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah:

Visi:

Unggul dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak sumber-sumber pendapatan daerah

Misi:

1. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis.
2. mengelola pelaksanaan pemungutan pajak daerah
3. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemungut pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan motto dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah “siap menjadi pembayar pajak bukan sekedar menjadi wajib pajak”.

Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah membentukepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tekhinis, penyusunan rencana pelaksanaan dan pemungutan dibidang pendapatan daerah.
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah.
- c. Pelaksanaan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakandirektorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembaliSPOP wajib pajak .
- e. Penyampaian SPPT, SKP, SPT, dan sarana administrasi PBB lainn yang diterbitkan oleh dirjen pajak kepada wajib pajak serta menyampaikan DHPP PBB yang dibuat oleh dirjen pajak kepada pemungut PBB yang ada dibawah pengawasan.
- f. Pengupayaan peningkatan pendapatan asli daerah serta penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru
- g. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- h. Koordinasi pengawsan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada daerah.
- i. Perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
- j. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Sub Dinas Program, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kebijakan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan serta pengendalian potensi pendapatan daerah.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak/retribusi daerah, serta pendataan objek pajak/retribusi daerah, melaksanakan perhitungan dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak.

Sub Dinas Penagihan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penagihan pajak/retribusi daerah yang telah lewat waktu jatuh tempo, melakukan pembukuan dan verifikasi, melayani keberatan dan permohonan banding serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap pendapatan/retribusi daerah.

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan badan usaha milik daerah, melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan pembukuan dan

pelaporan mengenai penerimaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak, serta mempelajari peraturan perundang-undangan dan pengkajian sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

